

Judul : DPR belum pastikan panggil Agus dan Jokowi
Tanggal : Rabu, 06 Desember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

DUGAAN INTERVENSI

DPR belum Pastikan Panggil Agus dan Jokowi

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikap dugaan intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus KTP-E yang diungkap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. Ketua DPR Puan Maharani menyebut akan mencermati apakah penggunaan hak interpelasi tersebut diperlukan atau tidak.

Puan menekankan DPR akan tetap mengedepankan supremasi hukum. "Yang kami kedepankan ialah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik dan benar. Bahwa kemudian nanti ada

wacana atau keinginan anggota untuk melakukan itu (interpelasi), itu merupakan hak anggota," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Pada kesempatan sama, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku masih mempertimbangkan untuk memanggil Agus Rahardjo dan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, keterangan Agus memang harus diperjelas, tapi ia juga mengatakan bahwa yang disampaikan Agus dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi itu sebelumnya sudah kedaluwarsa.

"Kalau mau itu diperjelas, ya

boleh-boleh saja, (tapi) ini kan barang kedaluwarsa. Mestinya dulu ketika dia menjadi Ketua KPK ngomong, kan begitu. Ini jadi ambigu kalau seperti ini, apalagi dengar Pak Agus (jadi) caleg, kan susah kita," cetusnya. Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha, setuju bila DPR berupaya membuat terang dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus KTP-E. Mereka mesti memanggil kedua belah pihak. Ia berharap DPR tidak sekadar janji, tapi serius untuk membuktikan.

Ia juga berpesan agar Agus yang memberikan testimoni

soal dugaan intervensi Presiden tidak sampai dikriminalisasi. "Jangan sampai orang yang memberi testimoni dikorbankan. Jangan sampai setiap orang yang bersuara soal pemberantasan korupsi terjadi kriminalisasi," paparnya. Senada, Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) FH Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, berharap DPR tidak hanya melempar gimik untuk membuka tabir kebenaran dugaan intervensi itu. Apalagi, menurutnya, selama ini DPR kerap 'masuk angin'.

"Itu masalah DPR selama

ini. Keseringan masuk angin. Fungsi pengawasan melemah ketika berhadapan dengan Presiden. Padahal, kalau DPR mengaktifkan fungsi pengawasan melalui penggunaan hak interpelasi atau hak angket, itu pertanda demokrasi kita sehat," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mencurigai ada motif tertentu di balik pernyataan Agus Rahardjo mengenai dugaan intervensi hukum oleh Presiden Joko Widodo. "Saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik," ungkap Moeldoko, kemarin.

"Saya mengimbau masyarakat untuk melihat isu dan situasi ini secara bijak dan cerdas," sambungnya. (Sru/Fah/Ind/X-3)